

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, S.E. M.Si., M. S.Ak. Ak. C.A.
3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd



Disusun Oleh:

Kelompok 9

Tiara Katrina	2313031059
Nazwa Devita Mawarni	2313031071

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025

KATA PENGANTAR

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan judul **“Laporan Keuangan Sektor Publik”** ini dengan tepat waktu. Laporan Keuangan Sektor Publik guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh **Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. Dr. Mega Metalia, S.E. M.Si., M. S.Ak. Ak. C.A. dan Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.** Selain itu penulis juga berharap supaya makalah ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait bidang yang ada dalam makalah ini, khususnya tentang laporan keuangan sektor publik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen pengampu mata kuliah **Akuntansi Sektor Publik** yang telah memberikan arahan dalam sistem kepenulisan makalah ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan dukungan moral, serta kepada teman-teman dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian makalah ini. Kami sebagai pihak penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyajikan makalah ini dengan sebaik-baiknya, berdasarkan pengetahuan dan sumber referensi yang kami cari.

Namun disamping itu pula, kami sebagai penulis juga menyadari bahwa dalam makalah ini didapati banyak kekurangan, baik dari segi kepenulisan maupun pembahasannya. Oleh karena, itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, agar dikemudian hari penulis dapat menyempurnakan penyusunan makalah.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2025

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik	4
2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	5
2.3 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik.....	6
2.4 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik	7
2.5 Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan	9
2.6 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta	11
2.7 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik	12
2.8 Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik.....	15
BAB III PENUTUP.....	18
3.1 Kesimpulan	18
3.2 Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi dan globalisasi telah mendorong perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu tuntutan utama yang muncul adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, laporan keuangan sektor publik memegang peranan krusial sebagai instrumen utama untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (Maschuroh & Priono, 2021). Laporan keuangan tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban internal, tetapi juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti legislatif, masyarakat, investor, dan lembaga pemeriksa.

Pergeseran paradigma dari administrasi pemerintahan tradisional menuju *New Public Management* turut mendorong reformasi dalam akuntansi sektor publik. Pemerintah dituntut untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mengukur kinerja tersebut, diperlukan informasi keuangan yang andal dan komprehensif. Laporan keuangan yang berkualitas menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja keuangan entitas pemerintah secara terstruktur (Putra & Varina, 2021). Informasi tersebut menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana pemerintah berhasil mengelola sumber daya publik demi kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan diwujudkan melalui serangkaian reformasi regulasi, yang puncaknya ditandai dengan penerbitan paket Undang-Undang di bidang keuangan negara dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penerapan SAP bertujuan untuk menyeragamkan praktik akuntansi di seluruh entitas pemerintah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami (Muwarni & Astuti, 2022). Kualitas laporan keuangan yang baik pada akhirnya akan meningkatkan

kepercayaan publik dan mendukung pengambilan keputusan ekonomi maupun politik yang lebih efektif.

Meskipun demikian, implementasi SAP dan penyusunan laporan keuangan sektor publik yang berkualitas bukan tanpa tantangan. Berbagai penelitian mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi pemerintahan, kompleksitas standar yang terus berkembang, serta kebutuhan akan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi (Baraka, 2023). Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan laporan keuangan sektor publik yang transparan dan akuntabel merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan efektivitas laporan keuangan sektor publik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat adanya jurang pemisah yang signifikan antara idealisme regulasi mengenai pelaporan keuangan sektor publik dengan realitas implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan sektor publik?
2. Apa saja tujuan dan fungsi dari laporan keuangan sektor publik?
3. Siapa saja yang menjadi pemakai laporan keuangan sektor publik dan apa kepentingannya?
4. Apa saja komponen-komponen laporan keuangan sektor publik yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan?
5. Apa saja hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik dalam konteks transparansi dan akuntabilitas?
6. Bagaimana perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta ditinjau dari tujuan, sumber dana, sistem akuntansi, serta struktur organisasinya?
7. Bagaimana siklus akuntansi keuangan sektor publik berlangsung mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan?

8. Apa saja teknik pelaporan keuangan sektor publik yang digunakan agar informasi keuangan dapat disajikan secara akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh pemakai laporan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Menjelaskan pengertian dan definisi laporan keuangan sektor publik.
2. Menguraikan tujuan serta fungsi laporan keuangan sektor publik dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang baik.
3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi pengguna laporan keuangan sektor publik beserta perannya.
4. Menjelaskan komponen utama laporan keuangan sektor publik sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Menganalisis hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik agar laporan dapat disusun secara relevan dan bermanfaat.
6. Membandingkan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta berdasarkan karakteristik, tujuan, dan sistem akuntansinya.
7. Mendeskripsikan tahapan siklus akuntansi keuangan sektor publik dari pengenalan transaksi hingga pelaporan.
8. Menjelaskan teknik pelaporan keuangan sektor publik yang efektif, transparan, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

BAB II

PEMBAHASAN

1.1 Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Menurut Yusra (2016), laporan keuangan sektor publik adalah penyajian informasi keuangan yang berasal dari berbagai transaksi dalam organisasi sektor publik. Setiap organisasi di sektor ini wajib menyusun laporan keuangan eksternal, yang biasanya mencakup laporan surplus-defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, laporan laba rugi, serta laporan kinerja yang bisa diukur baik secara finansial maupun non-finansial. Laporan keuangan sektor publik adalah gambaran kondisi keuangan yang berasal dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik (Majid, 2019). Sedangkan menurut Indrayani (2022), laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan.

Penyusunan laporan ini memiliki beberapa tujuan. Dari sisi manajemen, laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja organisasi maupun pengelolanya. Sementara bagi pihak eksternal, laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan sektor publik juga harus diaudit untuk memastikan penyajian yang benar dan wajar (*true and fair presentation*).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sektor publik adalah catatan yang menunjukkan bagaimana uang dikelola dalam organisasi sektor publik. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat agar pengelolaan keuangan lebih transparan. Selain itu, laporan keuangan sektor publik juga membantu menilai kinerja organisasi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

2.2 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Adapun tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan dan Pengelolaan**

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada para pengguna dan pihak berwenang bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku.

2. **Akuntabilitas dan Pelaporan Restrospektif**

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus alat untuk memantau kinerja dan menilai manajemen (Yusra, 2016). Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar dalam melihat perkembangan trend dari waktu ke waktu, mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditentukan, serta membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Tidak hanya itu, laporan keuangan juga memberi kesempatan bagi pihak eksternal untuk mengetahui biaya atas barang dan jasa yang diterima serta menilai sejauh mana organisasi mampu menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.

3. **Kelangsungan Organisasi**

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

4. **Hubungan Masyarakat (Humas)**

Laporan keuangan berperan sebagai sarana bagi organisasi untuk menyampaikan capaian kinerjanya kepada pemilik, karyawan, masyarakat, serta menjadi media komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Majid, 2019).

5. **Sumber Fakta dan Gambaran**

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam. Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan (Mahsun, 2016) antara lain:

- Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
- Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan berperan penting dalam mendukung kualitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah perlu dievaluasi dari sisi manfaatnya bagi pengambilan keputusan serta kemudahan pemakai dalam memahami isinya. Dalam akuntansi sektor publik, informasi yang disajikan terbatas pada aspek keuangan yang diukur dengan satuan moneter.

2.3 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasi dengan melihat siapa saja yang menjadi stakeholder dalam suatu organisasi. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Mahsun dkk. (2011), terdapat beberapa kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik, yaitu:

1. Masyarakat
2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman;
4. Pemerintah.

Sedangkan menurut Drebin et al. (1981) dalam (Majid, 2019), ada sepuluh kelompok pengguna laporan keuangan sektor publik, antara lain:

1. Pembayar pajak (*tax payers*)
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*)
3. Penanam modal
4. Pengguna jasa (penerima layanan berbayar)
5. Karyawan/pegawai
6. Pemasok (*vendor*)
7. Dewan legislative
8. Manajemen

9. Pemilih (*voters*)

10. Badan pengawas

Pengelompokan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan penerima layanan berbayar merupakan penyedia dana bagi organisasi, karyawan dan pemasok berperan sebagai penyedia tenaga kerja dan sumber daya, sementara dewan legislatif dan manajemen bertugas mengambil keputusan terkait alokasi sumber daya. Seluruh aktivitas tersebut diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk juga pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

2.4 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Komponen-komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi (Yusra, 2016):

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Dalam bentuk paling sederhana, laporan ini harus memuat akun-akun penting seperti: aset tetap (properti, pabrik, dan peralatan), aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, persediaan, penerimaan dari transaksi non-pertukaran (misalnya pajak dan transfer), piutang dari transaksi pertukaran, serta kas dan setara kas.

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan Kinerja Keuangan atau Laporan Surplus-Defisit (sering disebut laporan laba rugi) adalah laporan yang menampilkan informasi mengenai pendapatan dan beban dalam suatu periode tertentu. Isi minimum laporan ini meliputi: pendapatan dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari operasi, beban keuangan, surplus atau defisit bersih dari investasi asosiasi maupun joint venture yang memakai metode ekuitas, surplus atau defisit dari kegiatan normal, pos-pos luar biasa, porsi kepemilikan minoritas atas surplus atau defisit bersih, serta total surplus atau defisit bersih pada periode tersebut.

3. Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto

Laporan Perubahan dalam Aktiva/Ekuitas Neto menunjukkan total surplus atau defisit bersih selama satu periode, ditambah pendapatan dan beban lain yang langsung diakui sebagai perubahan ekuitas, serta kontribusi dari dan kepada pemilik. Laporan ini mencakup:

- a. Kontribusi dari pemilik serta distribusi kepada pemilik.
- b. Saldo akumulasi surplus atau defisit di awal periode, pada tanggal laporan, dan perubahan selama periode.
- c. Rincian komponen aset/ekuitas neto secara terpisah beserta rekonsiliasi nilai tercatat masing-masing komponen pada awal dan akhir periode untuk menunjukkan setiap perubahan yang terjadi.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berisi informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Arus kas biasanya dikelompokkan menjadi tiga aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas investasi. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan karena dapat menjadi dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

5. Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan tambahan yang penting bagi pemahaman laporan keuangan. Secara umum, catatan ini harus:

- a. Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan pada transaksi maupun peristiwa penting.
- b. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik, namun tidak tercantum dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, atau laporan perubahan aktiva/ekuitas neto.
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan utama, namun tetap diperlukan agar penyajian laporan keuangan menjadi wajar.

2.5 Hak dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan

Dalam sektor publik, laporan keuangan bukan hanya alat pengukuran kinerja internal atau pembukuan belaka, tetapi juga saran penting untuk memenuhi hak dan kebutuhan para pemakai (stakeholders) yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya publik. Pemahaman terhadap hak dan kebutuhan pemakai ini menjadi sangat penting agar laporan keuangan sektor publik dapat disusun secara tepat sasaran dan informatif.

Hak Pemakai

Hak-pemakai laporan keuangan sektor publik secara garis besar mencakup:

1. Hak atas akuntabilitas dan transparansi

Pemakai memiliki hak mengetahui bagaimana pemerintah atau entitas publik menggunakan dana yang dipercayakan kepadanya, termasuk anggaran, realisasi, serta hasil dari penggunaan dana tersebut. Sebagai contoh, dalam kerangka kerja International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) disebutkan bahwa laporan keuangan harus memenuhi objektif *accountability* agar entitas publik dapat dipertanggungjawabkan di hadapan legislatif dan masyarakat.

2. Hak atas informasi yang relevan dan andal

Pemakai berhak menerima informasi keuangan yang relevan (bermanfaat untuk pengambilan keputusan) dan andal (dapat dipercaya) sehingga memungkinkan mereka untuk membuat penilaian terhadap entitas publik. Sebuah studi menyebut pemakai membutuhkan “*sufficient and reliable information*” agar dapat mengevaluasi akuntabilitas lembaga publik.

3. Hak atas pemahaman dan perbandingan

Laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pemakai yang memiliki pengetahuan wajar mengenai aktivitas pemerintah, serta memungkinkan perbandingan antar periode atau antar entitas agar pemakai dapat memantau tren dan kinerja. Sebagai contoh, laporan yang dirancang untuk publik harus mempertimbangkan bahwa pengguna mungkin tidak memiliki keahlian akuntansi yang mendalam, sehingga “*the report should be understood by the whole community*”.

4. Hak atas partisipasi atau umpan balik

Meskipun tidak selalu secara langsung dalam laporan keuangan saja, hak partisipasi publik dalam memahami, mengkritisi, dan memberikan masukan terhadap laporan juga merupakan bagian dari hak pemakai dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kebutuhan Pemakai

Dalam praktiknya, pemakai laporan keuangan sektor publik memiliki kebutuhan informasi yang spesifik, antara lain:

1. Kebutuhan untuk menilai kepatuhan anggaran dan realisasi terhadap rencana

Information about how actual spending and revenues compare to budgeted amounts is key. Sebagai tertulis: "information that enables users to compare financial results with the budget facilitates an assessment of the extent to which a public sector entity has met its financial objectives."

2. Kebutuhan untuk menilai posisi keuangan, arus kas, dan keberlanjutan

Pemakai perlu informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta kewajiban jangka panjang agar bisa menilai kemampuan entitas publik dalam menjalankan pelayanan ke depan. Kerangka kerja sektor publik menyebut perlunya informasi tentang "*long-term sustainability*" dari entitas publik.

3. Kebutuhan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan hasil kinerja

Selain aspek keuangan, pemakai membutuhkan informasi kinerja non-keuangan dan hasil pelayanan publik misalnya output, outcome, cost-efficiency. Sebuah studi di Malaysia menunjukkan bahwa stakeholder publik menganggap informasi kinerja non-keuangan sangat penting untuk pengungkapan pertanggungjawaban publik.

4. Kebutuhan untuk membuat keputusan atau memberikan masukan kepada entitas publik

Pemakai, terutama legislatif, masyarakat, dan pihak pengawas, memerlukan informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, pengalokasian sumber daya, maupun pengawasan dan kontrol. Kerangka internasional menyebut bahwa laporan keuangan publik

bertujuan untuk *decision usefulness* (kegunaan untuk pengambilan keputusan).

5. Kebutuhan untuk pengawasan eksternal dan kritik publik

Karena lembaga publik mengelola dana publik, pemakai publik (*citizens*) dan lembaga pengawas (*oversight bodies*) membutuhkan data yang memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan dan memberikan umpan balik, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi bagi Penyusunan Laporan Keuangan Sektor Publik

Memahami hak dan kebutuhan pemakai berarti penyusun laporan keuangan sektor publik harus mempertimbangkan:

- Desain laporan yang mencakup pengungkapan anggaran vs realisasi, posisi keuangan, arus kas, serta kinerja pelayanan publik.
- Bahasa dan format yang dapat dipahami oleh pemakai non-akuntan, misalnya masyarakat umum, sehingga meminimalkan hambatan pemahaman.
- Penyediaan informasi ke depan (*forward-looking*) serta kinerja non-keuangan agar pemakai bisa menilai keberlanjutan dan efektivitas entitas publik.
- Pengungkapan yang memadai untuk memungkinkan perbandingan antar periode atau antar entitas, sehingga pemakai dapat menilai tren dan kinerja relatif.
- Mekanisme untuk pengawasan dan partisipasi publik, sehingga laporan tidak hanya menjadi formalitas, melainkan alat yang efektif dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

2.6 Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta

Menurut Mardismo (2018), terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta. Berikut adalah rinciannya :

1. Tujuan Organisasi

Tujuan Organisasi tidak berorientasi pada keuntungan semata (nirlaba). Sektor publik memiliki tujuan utama untuk melayani dan

memenuhi keinginan dan kebutuhan publik. Sedangkan sektor swasta, mereka memiliki tujuan untuk mencari keuntungan (profit).

2. Sumber dana

Organisasi atau lembaga sektor publik memiliki sumber dana yang berasal dari retribusi daerah, pajak, utang, obligasi pemerintah dan lain-lain. Sedangkan sektor swasta berasal dari modal sendiri, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, laba ditahan dll.

3. Pertanggungjawaban

Sektor publik memiliki tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik atau masyarakat dan parlemen. Pada sektor swasta mereka memiliki tanggung jawab kepada kreditur dan pemegang saham.

4. Sktruktur organisasi

Sktruktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga atau organisasi sektor publik cenderung birokratis, hierarkis, dan kaku. Sedangkan sektor swasta lebih datar, fleksibel dan lain sebagainya.

5. Karakteristik anggaran

Anggaran dari sektor publik bersifat terbuka, sedangkan sektor swasta bersifat tertutup dari publik.

6. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi pada sektor publik biasanya menggunakan beberapa sistem akuntansi seperti *cash basis*, *cash towards accrual*, *accrual basis*. Pada sektor swasta umumnya menggunakan sistem *accrual basis*.

2.7 Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Siklus akuntansi keuangan sektor publik merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh entitas pemerintah untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis selama satu periode akuntansi. Siklus ini berfungsi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2019).

Menurut Halim dan Kusufi (2020), siklus akuntansi sektor publik adalah rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, serta kinerja entitas publik. Proses ini harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010.

Tahapan Siklus Akuntansi Keuangan Sektor Publik

1. Pengenalan dan Analisis Transaksi

Tahap awal siklus akuntansi dimulai dengan identifikasi dan analisis transaksi keuangan. Setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban pemerintah harus diidentifikasi untuk menentukan apakah transaksi tersebut relevan dan memiliki dampak terhadap laporan keuangan.

Contohnya adalah penerimaan pajak, belanja pegawai, belanja modal, atau hibah dari pemerintah pusat ke daerah (Halim & Kusufi, 2020).

2. Pencatatan dalam Jurnal

Setelah transaksi diidentifikasi, tahap berikutnya adalah pencatatan ke dalam jurnal umum atau jurnal khusus menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual sesuai dengan SAP. Pencatatan ini menggunakan prinsip debit dan kredit, di mana setiap transaksi dicatat secara kronologis untuk menjaga ketertiban administrasi keuangan (Mahmudi, 2019).

3. Posting ke Buku Besar

Data dari jurnal kemudian dipindahkan (posting) ke dalam buku besar yang memuat saldo tiap akun seperti kas, piutang, belanja, pendapatan, dan ekuitas dana. Buku besar ini menjadi dasar dalam penyusunan neraca saldo di tahap berikutnya.

4. Penyusunan Neraca Saldo

Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit seimbang. Tahap ini berfungsi sebagai alat kontrol internal agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan penyesuaian (*adjusting entries*).

5. Penyesuaian dan Koreksi

Pada akhir periode akuntansi, dilakukan jurnal *penyesuaian* (*adjustment journal*) untuk mencatat transaksi yang belum diakui atau untuk memperbaiki kesalahan pencatatan, misalnya beban yang masih harus dibayar atau pendapatan yang masih harus diterima.

6. Penyusunan Laporan Keuangan

Tahap puncak dari siklus akuntansi sektor publik adalah penyusunan laporan keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- h. (Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], 2021).

7. Penutupan dan Pelaporan

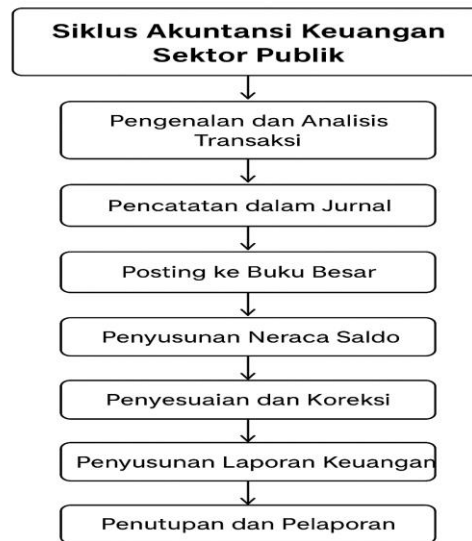
Setelah laporan keuangan selesai disusun, dilakukan jurnal penutup untuk menutup akun nominal (pendapatan dan beban) dan memindahkan saldo akhir ke akun ekuitas. Laporan keuangan kemudian disampaikan kepada lembaga pemeriksa (BPK) dan dipublikasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Tujuan Siklus Akuntansi Sektor Publik

Siklus akuntansi ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
- Menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan publik.
- Menjamin bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilakukan secara tertib, efisien, dan efektif.

- Memenuhi kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku (Halim & Kusufi, 2020).



2.8 Teknik Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Pelaporan keuangan sektor publik adalah proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh entitas pemerintah atau publik, yang bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pengelolaan keuangan dan kinerja kepada para pemangku kepentingan (legislatif, masyarakat, investor publik, lembaga pengawas) (Putri & Jannah, 2022).

Teknik pelaporan merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk menyusun, menyajikan dan mengungkapkan informasi keuangan tersebut secara konsisten, transparan, dan mudah dipahami oleh pemakai laporan.

Teknik Pelaporan Utama

Berikut beberapa teknik pelaporan keuangan sektor publik yang sering diterapkan, terutama di Indonesia:

1. Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Teknik ini berarti entitas publik menyusun laporan keuangan dengan mengakui transaksi berdasarkan saat hak dan kewajiban muncul, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Hal ini memungkinkan penyajian posisi keuangan yang lebih lengkap (aset, kewajiban) dan arus kas yang lebih transparan. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam sektor publik guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Contoh teknik: pengakuan

penyusutan aset tetap, pengakuan kewajiban imbalan pasca-kerja, pengakuan pendapatan yang masih harus diterima, dll.

2. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Anggaran vs Realisasi

Teknik ini meliputi penyajian perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi yang terjadi selama periode pelaporan. Teknik ini penting di sektor publik karena anggaran pemerintah merupakan instrumen kontrol utama, dan pemakai laporan mempunyai kebutuhan untuk menilai apakah realisasi sesuai dengan anggaran. Sebagai contoh: laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan realisasi belanja/pendapatan dibandingkan anggaran.

Teknik ini biasanya mencakup: pengungkapan selisih antara anggaran dan realisasi, pengelompokan berdasarkan fungsi/program/klasifikasi anggaran, dan narasi penjelasan atas selisih yang signifikan.

3. Pengungkapan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Komponen Laporan Lengkap

Teknik pelaporan yang baik tidak hanya menyajikan angka utama (neraca, laporan operasional, arus kas) tetapi juga memanfaatkan catatan atas laporan keuangan untuk mengungkapkan asumsi, kebijakan akuntansi, risiko, kontinjensi, dan penjelasan tambahan. Sebuah penelitian pada instansi publik menunjukkan bahwa pengungkapan seperti ini penting untuk menilai kredibilitas informasi keuangan. Contoh: pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi, pengaruh pandemi, kewajiban jangka panjang, aset tetap, dan aset yang belum terukur.

4. Pelaporan Kinerja dan Non-Kuangan (*Output / Outcome*) Terintegrasi

Karena sektor publik selain mengelola keuangan juga menyelenggarakan pelayanan publik, teknik pelaporan semakin menuntut integrasi antara informasi keuangan dan non-keuangan (misalnya output layanan, outcome sosial). Teknik ini bisa mencakup pelaporan anggaran program, indikator kinerja, penjelasan atas penggunaan dana dalam mencapai hasil. Beberapa literatur menekankan bahwa pengukuran kinerja dan pengungkapan non-keuangan merupakan bagian dari pelaporan akuntabilitas sektor publik yang efektif. Contoh: laporan keuangan yang

menyertakan indikator jumlah layanan publik yang diberikan, tingkat kepuasan masyarakat, efisiensi biaya per unit layanan, dan keberlanjutan keuangan.

5. Pelaporan yang Mudah Diakses dan Dipahami Pemangku Kepentingan

Teknik pelaporan yang baik juga memperhatikan aspek komunikasi: format yang jelas, ringkasan eksekutif, infografik, ringkasan untuk publik (*layman's summary*), dan publikasi secara daring. Studi literatur menunjukkan bahwa aksesibilitas dan mudah dipahami oleh pemakai non-akuntan adalah faktor penting kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Contoh: laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat ringkasan keuangan, grafik, poin utama, serta versi publik yang “layman friendly”.

Implikasi dan Hal yang Perlu Diperhatikan

- Entitas publik perlu memastikan **konsistensi** dan *comparability* antar periode pelaporan agar pemakai bisa membandingkan kinerja.
- Perlunya sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mendukung teknik-pelaporan seperti akrual, pengungkapan CaLK, serta integrasi data kinerja keuangan dan non-keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan masih ada kendala SDM dan sistem informasi.
- Pentingnya pengendalian internal dan audit eksternal guna menjamin bahwa teknik pelaporan diterapkan secara benar dan laporan keuangan dapat dipercaya.
- Pelaporan keuangan yang baik harus mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dan bukan hanya formalitas administratif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan keuangan sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, pemerintah dapat menyajikan informasi yang komprehensif tentang posisi keuangan, arus kas, serta realisasi anggaran secara akurat. Siklus dan teknik pelaporan keuangan yang baik tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, laporan keuangan sektor publik bukan sekadar bentuk pertanggungjawaban administratif, melainkan juga sarana penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan kebijakan, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

3.2 Saran

Dalam makalah ini tentunya masih terdapat banyak kesalahan baik dalam segi kepenulisan maupun penjabaran materi. Adapun nantinya penulis akan berusaha memperbaiki dan memperhatikan susunan makalah ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber. Penulis juga dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, demi menyempurnakan penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini memiliki manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Araka. (2023). *Akuntansi Pemerintahan: Tantangan dan Peluang dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik*. Biro Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Karir (BARAKA) Universitas Medan Area. <https://baraka.uma.ac.id/akuntansi-pemerintahan-tantangan-dan-peluang-dalam-pengelolaan-keuangan-sektor-publik/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI. <https://www.bpk.go.id>
- Baraka, D. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112–125.
- Basnan, N., Salleh, M. F. M., Ahmad, A., Upawi, I., & Harun, A. (2016). *Information Needs for Accountability Reporting: Perspectives of Stakeholders of Malaysian Public Universities*. *Acta Universitatis Danubius. OEconomica*, 12(3). <https://journals.univdanubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/3353/3304>
- European Public Sector Accounting. (n.d.). *Users of General Purpose Financial Statements*. https://www.focal.red/sites/default/files/documents/European_public_sector_accounting.pdf
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanuddin, A. B., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2023). *Public Sector Accounting: A Key to Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Asian Journal of Applied Business and Management*. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v3i4.12250>
- Ken Tysiac. (2013). *International Public Sector Accounting Standards Board Identifies Primary Users of GPFs of Public-Sector Entities*. *Journal of*

Accountancy.

<https://www.journalofaccountancy.com/news/2013/jan/20137173.html>

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2020). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan SAP*. Jakarta: KSAP.

Kurniati, I. P., Siboro, S. F., Angeli, M., & Vero, M. A. W. (2023). *Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Perencanaan Anggaran pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2022*. *Akuntansi*.
<https://doi.org/10.55606/akuntansi.v3i2.1995>

Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 4). Yogyakarta: UII Press.
<https://journal.uui.ac.id>

Maschuroh, A., & Priono, H. (2021). *Evaluasi Kinerja Reformasi Akuntansi Sektor Publik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pendekatan Kualitatif*. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 460–468.
<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK/article/view/1887>

“General Purpose Financial Reporting” – *Conceptual Framework for GPFs*. (2014).
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/nicsp/mconceptual_NICSP2014.pdf

Muwarni, A. S., & Astuti, R. P. (2022). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(2).
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/7126>

Muwarni, A., & Astuti, R. (2022). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 10(1), 45–56.

Nasyfa, S. Q., Lestari, B. P., & Saputra, D. P. (2023). *Akuntansi pada Organisasi Sektor Publik: Implementasi dan Tantangan*. *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital*.
<https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.615>

Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Office of the Auditor-General New Zealand. (2009). *Part 4: My Concerns about Financial Reporting Standards for the Public Sector*.
<https://oag.parliament.nz/2009/financial-reporting-standards/part4.htm>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putra, A., & Varina, N. (2021). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Implementasi Akuntansi Akrual dan Kompetensi Aparatur*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(2), 99–110.
- Putra, S., & Varina, R. (2021). *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Setyawan, W. (2023). *Bridging Between Financial Performance and Government Performance: The Role of Public Sector Accounting in Realizing Good Governance*. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*.
<https://doi.org/10.61942/oikonomia.v2i2.291>
- Siahay, A. Z. (2023). *Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting*. *Jurnal Economic Resource*, 6(2).
<https://doi.org/10.57178/jer.v6i2.1504>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- (2022, Januari 21). *Pengertian Akuntansi Sektor Publik dan Tujuannya*. Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area.
<https://akuntansi.uma.ac.id/2022/01/21/pengertian-akuntansi-sektor-publik-dan-tujuannya/>
- (2023). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah*. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3(2).
<https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2.467>

STUDI KASUS

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut (2018–2022). Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan dan akuntabilitas yang tinggi terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010. Penerapan sistem akrual di Surabaya dilakukan melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan mulai dari perencanaan anggaran, realisasi, hingga pelaporan. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan melaporkan transaksi berbasis akrual secara periodik agar konsolidasi data keuangan dapat dilakukan secara real-time oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, meskipun keberhasilan tersebut signifikan, BPK masih menemukan beberapa catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), antara lain:

- Masih adanya aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian ulang.
- Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari beberapa OPD.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknik pencatatan akrual penuh dan sistem pelaporan elektronik.

Pemerintah Kota Surabaya kemudian berupaya memperbaiki kelemahan ini melalui pelatihan akuntansi pemerintahan, modernisasi sistem informasi keuangan, serta pembentukan tim monitoring pelaporan keuangan antar-OPD. Kasus ini menggambarkan bagaimana keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual memerlukan kombinasi antara komitmen pimpinan daerah, kesiapan SDM, serta dukungan sistem informasi keuangan yang baik. Keberhasilan memperoleh opini WTP bukan semata karena kepatuhan administratif, tetapi juga karena kemampuan entitas pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan transparan.

Pertanyaan Studi Kasus

1. Jelaskan bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik!
2. Menurut kamu, mengapa beberapa OPD di Pemerintah Kota Surabaya asih mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual?
3. Bagaimana peran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan?